



KEMENPKP

RENCANA AKSI KINERJA

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI I

TA. 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat serta kuasa-Nya sehingga Dokumen Rencana Aksi (T0) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Aksi ini merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja (PK) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2026 di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I memiliki tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitas serah terima aset. Dalam melakukan tugasnya tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki fungsi Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan,

Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman, Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian, Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan, Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan, Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan Kawasan permukiman, Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan,

Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset, Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, Pembangunan zona integritas, system pengendalian intern, sistem manajemen risiko serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan dan Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memuat rencana pelaksanaan pekerjaan bulanan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan. Rencana tersebut digunakan sebagai dievaluasi pencapaian target per bulan untuk menjadi ukuran kinerja dalam bentuk laporan pengukuran kinerja bulanan. Dengan adanya Rencana Aksi ini diharapkan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Manado, April 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sulawesi I,



ERPIKA ANSELA SURIRA, S.T.
NIP. 19821022 200605 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
B.1 Subbagian Umum dan Tata Usaha	3
B.2 Seksi Pelaksanaan Wilayah I	3
B.3 Seksi Pelaksanaan Wilayah II	4
B.4 Kepala Satuan Kerja (Kasatker)	4
B.5 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	4
B.6 Bendahara	5
BAB II	11
PENETAPAN KINERJA	11
2.1. TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	11
2.1.1.Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan	12
2.2 Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I	15
BAB III	20
PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Sekretariat Jenderal.....</i>	<i>8</i>
Tabel 1.2 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	8
Tabel 1.3 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	9
Tabel 1. 4 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	10
Tabel 1.5 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	10
Tabel 2.1 : Amanat DIPA Berdasarkan DIPA Awal Tahun Anggaran 2026	11
Tabel 2.2 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kerja (PK) awal 2026 Sekretariat Jenderal	12
Tabel 2.3 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2026 Direktorat jendral Kawasan Permukiman.....	12
Tabel 2. 4 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2026 Direktorat Jenderal Kawasan Perdesaan.	13
Tabel 2. 5 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2026 Direktorat Jenderal Kawasan Perkotaan	14
Tabel 2. 6 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2026 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	15
Tabel 2. 7 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Sekretariat Jenderal.....	16
Tabel 2. 8 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Kawasan Permukiman.....	16
Tabel 2.9 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan.....	16
Tabel 2. 10 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan.....	18
Tabel 2. 11 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Tata Kelola.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai P3KP Sulawesi I.....	6
---	---

The page features decorative geometric patterns in the corners. The top-left and bottom-left corners contain triangles in dark blue, gold, and white, with some triangles having horizontal stripes. The top-right and bottom-right corners contain triangles in dark blue, gold, and white, with some triangles having horizontal stripes. The central text is in a bold, dark blue, sans-serif font.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yang sebelumnya adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman, saat ini merupakan unit organisasi dibawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tiga wilayah cakupan kerja yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo yang dalam pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo.

Rencana Aksi Unit Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I merupakan penjabaran secara periodik atas sasaran dan target yang tertuang dalam Perjanjian kinerja (PK). Rencana Aksi ini akan menjadi acuan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja secara berkala, yaitu pada tiap bulan dalam 1 (satu) tahun. Untuk memberikan gambaran perencanaan dan kinerja yang akan diukur, maka akan diuraikan terlebih dahulu tugas dan fungsi serta struktur organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I sesuai Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan; Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan Kawasan permukiman;
- Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- Pelaksanaan fasilitasi serah terima asset;
- Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, Pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan

- Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

Tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I ini kemudian diturunkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing subbagian dan seksi yang terdapat di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Berikut merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing subbagian dan seksi tersebut:

B.1 Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan Pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan system pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi public serta layanan hukum balai. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Subbagian Umum dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program dan anggaran
- Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi kepegawaian
- Pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan
- Pengelolaan data dan informasi
- Fasilitasi serah terima aset
- Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
- Koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai

B.2 Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas :

- Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; serta

- Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitas penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

B.3 Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas :

- melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

B.4 Kepala Satuan Kerja (Kasatker)

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I memiliki 4 Satuan Kerja yaitu Satuan Kerja Balai P3KP Sulawesi I, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Kasatker bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

B.5 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas dan fungsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Kerja BP3KP Sulawesi I dan Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo, memiliki PPK yang menyelenggarakan fungsi:

- Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- Pembuatan, penandatanganan, dan pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
- Pengendalian pelaksanaan perjanjian/kontrak
- Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA
- Penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya dengan Berita Acara Penyerahan kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I untuk diteruskan kepada Menteri PKP

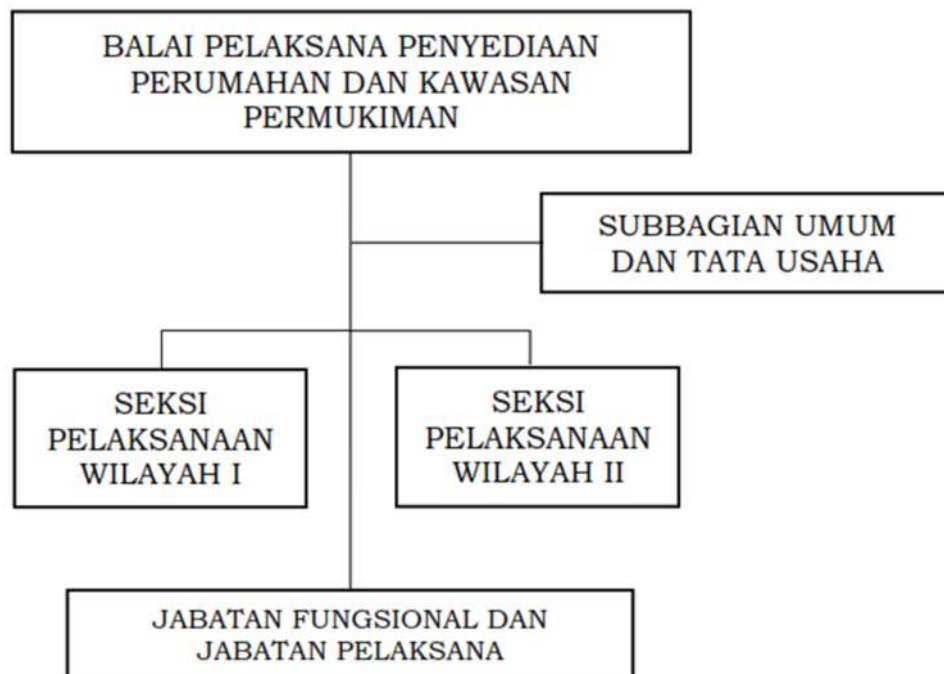
B.6 Bendahara

Balai P3KP memiliki 4 Bendahara yang masing-masing berkedudukan di Satker BP3KP Sulawesi I dan Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo. Bendahara melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bendahara menyelenggarakan fungsi:

- Pengelolaan dan pembukuan uang/surat berharga
- Pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
- Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih
- Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak
- Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran
- pengeluaran (akun 6 digit)

- Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN

Pengelolaan sumber daya manusia, menjadi fondasi penting dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, sumber daya manusia yang terkelola dengan profesional dan responsif akan melahirkan aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi dan sigap dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan ke depan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai P3KP Sulawesi I

Sesuai dengan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian PKP diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta pengukuran kinerja per triwulan dan tahunan. Adapun Sistem Kinerja dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui Upaya merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja

secara berkesinambungan guna mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I berupaya secara terus – menerus menerapkan prinsip – prinsip perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kerja yang berisikan perjanjian antara Pihak yang diberikan tanggung jawab (dalam hal ini Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I) dengan Pihak Pimpinan yang memberikan tanggung jawab dalam hal ini 5 unit organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Kawasan permukiman, Direktorat Perdesaan, Direktorat Perkotaan, dan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I selama satu tahun kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Dokumen Penetapan Kinerja disusun setelah terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini dimaksudkan agar Dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dibuat lebih realistis dengan kegiatan dan ketersediaan dana. Dokumen Penetapan (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam Pengukuran Kinerja suatu unit organisasi. Terdapat 2 program dalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yaitu: 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 2) Program Dukungan Manajemen.

Tabel 1.1 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Sekretariat Jenderal

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	1	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan
		2	Jumlah Layanan Umum	4 layanan
		3	Jumlah Layanan Sarana Internal	4 Unit

Tabel 1.2 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 dokumen
		2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 dokumen
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1	Jumlah Layanan Umum	4 layanan
		2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 layanan
		3	Jumlah Layanan BMN	1 layanan

Tabel 1.3 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		2	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Kegiatan
4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Umum	2 Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

Tabel 1. 4 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan
2.	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1.	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3.	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
5.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen				
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.	Jumlah Layanan Umum	4 Layanan
		2.	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
		3.	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan

Tabel 1.5 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2.	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaratata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	1.	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Rekomendasi Kebijakan

The page features decorative geometric patterns in the corners. The top-left and bottom-left corners contain triangles in dark blue, gold, and white, with some triangles having horizontal stripes. The top-right and bottom-right corners contain triangles in dark blue and white, with some triangles having horizontal stripes. The central text is in a bold, dark blue, sans-serif font.

BAB II

PENETAPAN

KINERJA

BAB II PENETAPAN KINERJA

2.1. TARGET DAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I mempunyai tugas yaitu mendukung Pencapaian Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk itu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I mendukung 2 (dua) program yang melekat yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan melalui 4 Satker yaitu:

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
2. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara;
3. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
4. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan DIPA Awal TA. 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki amanat menjalankan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen dengan detail pagu anggaran tiap unit organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Amanat DIPA Berdasarkan DIPA Awal Tahun Anggaran 2026

No	Unit Organisasi	DIPA Awal				Jumlah
		Satker Balai	Satker PKP Prov. Sulut	Satker PKP Prov. Malut	Satker PKP Prov. Malut	
1	Sekretariat Jenderal	946.375.000	1.260.406.000	680.024.000	755.032.000	3.659.837.000
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	365.690.000	48.939.000	38.017.000	48.616.000	501.262.000
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	425.321.000	20.378.550.000		53.365.000	20.857.236.000
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	404.760.000	32.336.000	39.260.000	40.414.000	506.770.00
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	167.676.000	-	-	-	167.676.000

2.1.1.Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I bertanggung jawab terhadap Perjanjian Kinerja (PK) pada 5 (lima) unit Organisasi diantaranya Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Diektorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman Sulawesi I, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa Balai Pelaksana Penyediaan bersama dengan Satuan Kerja memiliki tanggungjawab yang terus menerus (*in line*) dalam mencapai target Kementerian PKP.

Tabel 2.2 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kerja (PK) awal 2026
Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Balai P3KP Sulawesi I	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1
		Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1
		Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1

Tabel 2.3 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2026
Direktorat jendral Kawasan Permukiman.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	-	-	-
		Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	-	-	-

Tabel 2. 4 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2026
Direktorat Jenderal Kawasan Perdesaan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	-	-	-
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan				
2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	-	-	-
		Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	Dokumen	1			
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	-	-	-	-
4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
		Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	-	-	-
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1		-
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	-	-	-

Tabel 2. 5 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2026
Direktorat Jenderal Kawasan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	1	1
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	-	-	-
		Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	-	-	-

Tabel 2. 6 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2026
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	2	-	-	-
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaratata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-

2.2 Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I

Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I mengacu pada target Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I tahun Anggaran 2026. Hal ini merupakan penjabaran dari target kinerja beberapa unit organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Tabel 2. 7 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Per Triwulan (%)				
			Target PK	TW I	TW II	TW III	TW IV
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Balai P3KP Sulawesi I	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	100	0	0	0
		Jumlah Layanan Umum	4 Layanan	100	0	0	0
		Jumlah Layanan Sarana Internal	4 Unit	0	0	0	100

Tabel 2. 8 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Kawasan Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Per Triwulan (%)				
			Target PK	TW I	TW II	TW III	TW IV
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	0	0	0	100
		Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	100
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	0	0	0	100
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan Umum	4 Layanan	100	0	0	0
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	4 Layanan	100	0	0	0
		Jumlah Layanan BMN	4 Layanan	100	0	0	0

Tabel 2.9 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Per Triwulan (%)				
			Target PK	TW I	TW II	TW III	TW IV
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Per Triwulan (%)				
			Target PK	TW I	TW II	TW III	TW IV
	dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	Perumahan Perdesaan					
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen	0	0	0	100
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	-	-	-	
2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen	0	0	0	100
		Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1 Dokumen	0	0	0	100
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	-	-	-	-
4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	100
		Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	0	0	0	100
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	100
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Umum	2 Layanan	100	0	0	0
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	100	0	0	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Per Triwulan (%)				
			Target PK	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan						

Tabel 2. 10 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target Capaian Per Triwulan (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	100
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan	0	0	0	100
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	100
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	100
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	100
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	100
Program Dukungan Manajemen							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan Umum	4 Layanan	100	0	0	0
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	100	0	0	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target Capaian Per Triwulan (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
		Jumlah Layanan BMN	1 Layanan	100	0	0	0

Tabel 2. 11 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target Capaian Per Triwulan (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	100
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	100
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaratata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	100

The page features decorative geometric patterns in the corners. The top-left and bottom-left corners contain triangles in dark blue, gold, and white, with some triangles filled with horizontal stripes. The top-right and bottom-right corners contain a pinwheel-like pattern of dark blue and gold triangles meeting at the center, also with some striped triangles.

BAB III

PENUTUP

BAB III PENUTUP

Rencana aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I disusun berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam Perjanjian kinerja. Adapun rencana pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I secara umum mengikuti pola dan siklus kerja tahapan perencanaan program secara umum. Sasaran, target *outcome* dan *output* yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I perlu diacu dalam pelaksanaan kegiatannya melalui rencana aksi per-bulanan yang telah disusun ini.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut juga perlu adanya kerja keras dari seluruh jajaran baik staf maupun pimpinan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I untuk secara bersama-sama guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2029. Dengan disusunnya Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I tahun 2026 ini maka seluruh jajaran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I agar dapat meningkatkan pengelolaan kinerjanya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan